

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik secara ringkas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kekuasaan, pemerintahan, proses memerintah dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga/institusi, tujuan negara atau pemerintahannya.¹ Pemahaman masyarakat terhadap politik dalam suatu negara sangatlah penting, politik itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemerintahan, dalam pengertian lain politik adalah usaha untuk mengatur urusan orang banyak, baik dalam negeri maupun luar negeri.² Sebagai salah satu mekanisme penilaian demokrasi yang baik, sudah selayaknya masyarakat dalam suatu negara juga memahami politik dengan baik, dengan instrumen yang pas yaitu pendidikan politik yang sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, pendidikan politik juga berkaitan dengan sebuah kontestasi politik yang dilalui dan dilakukan oleh partai-partai politik.

Perdebatan seputar kontestasi politik memang tidak pernah pudar, seiring masuknya tahapan modernisasi dalam kehidupan bangsa serta kondisi masyarakat yang dinamis dalam memilih pemimpin dan pola pikir yang sudah melihat pada hal-hal yang substansial, namun kondisi ini tidaklah merata diseluruh daerah di Indonesia, terdapat daerah-daerah yang

¹Rudy Hartono, *Fungsi Dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Program Studi Pendidikan Ips Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2016.hlm.4

²Hasan Ahmadi, *Politik Hukum Di InDonesia*. (Magelang:PKBM Ngudi Ilmu,2013).hlm.17

masyarakatnya masih sangat kurang tersentuh dengan yang namanya pendidikan politik. Politik sebagai jalan untuk mensejahterakan rakyat dalam konteks kebijakan yang akan diambil nantinya, maka objek dari politik itu sangatlah penting untuk diberikan pemahaman secara intensif, maka tugas dari partai politik untuk memberikan pendidikan politik harus dilaksanakan secara baik dan menyeluruh, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

Sistem multi Partai atau dengan partai yang cukup banyak, membuat persaingan yang kuat antar partai, hal ini menyebabkan pandangan pragmatis dalam sebuah proses politik, misalnya dalam pemilihan umum. Dalam pemilu partai-partai politik hanya melihat kalah dan menangnya saja tidak lagi pada kualitasnya, padahal partai politik juga harus menyiapkan orang-orang yang berkompeten dalam pemilu supaya kebijakan yang diolah nantinya berdampak baik pada rakyat, disitulah peran pendidikan politik harus dilaksanakan agar semua yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Pembentukan partai politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga Negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Pemilihan umum pada tahun 2004 adalah awal dimulainya pemilu secara langsung oleh rakyat dan dengan segala permasalahan dalam proses

³Hasan Ahmadi, *Politik Hukum Di Indonesia*. (Magelang:PKBM Ngudi Ilmu,2013).hlm.36

pelaksanaannya, tentunya sangat menarik untuk diperbincangkan, permasalahan pada saat itu mencetak pengalaman buruk langkah awal pemilu langsung di Indonesia, pada mulanya pemilu secara langsung diharapkan dapat memperbaiki iklim demokrasi pada masa-masa sebelumnya yang semuanya dikuasai oleh parlemen saja, dan dipandang erat mengedepankan kepentingan politik suatu golongan. Sistem parlementer yang memberikan kebebasan luas pada partai dan adanya praktik oposisi justru memperkuat perbedaan yang ada, ketidakstabilan politik semakin ditopang oleh ketidakpuasan daerah terhadap pusat.⁴

Pendidikan politik menjadi indikator pelaksanaan pemilu tersebut baik atau tidak, pemahaman politik terhadap kader dan masyarakat harus ditingkatkan, kemampuan kader partai dalam menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya dan pemahaman masyarakat akan fungsi partai politik yang harus ditingkatkan di daerah.

Sebagai pilar dalam demokrasi, partai politik mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai sarana rekrutmen politik, pendidikan politik, dan komunikasi politik. Pada kenyataannya fungsi partai politik terutama dibidang komunikasi politik hingga kini dirasa masih sangat lemah.⁵

Seperti halnya di Kabupaten hulu Sungai Utara, daerah ini merupakan salah satu daerah yang dikategorikan tertinggal, dimana

⁴Hasan Ahmadi, *Politik Hukum Di Indonesia*. (Magelang:PKBM Ngudi Ilmu,2013).hlm.22

⁵Maarotong, Jenli. *Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik (Suatu Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud)*.Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Politik Fisip Unsrat. hlm.1

masyarakatnya dalam hal pendidikan masih sangat kurang, terutama pemahaman tentang politik. Masyarakat di Kabupaten hulu Sungai Utara sudah sangat erat hubungannya dengan yang namanya uang politik, sikap pragmatis dari para calon dan kader partai politik dengan melihat pemilu sebagai tujuan untuk kalah atau menang, secara tidak langsung mendidik masyarakat kepada politik yang tidak baik. Hampir seluruh desa di Kabupaten hulu Sungai Utara dapat dipengaruhi dengan adanya uang politik, permasalahan klasik dan terus berulang harus dihilangkan.

Dalam sistem politik, partai politik adalah bagian dan infrastruktur politik yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik berupa dukungan, keluhan ataupun tuntutan.⁶ Partai politik merupakan institusi yang menjadi penyangga bekerjanya demokrasi perwakilan. Selama demokrasi perwakilan masih dipandang sebagai cara yang paling masuk akal untuk mewujudkan kedaulatan rakyat maka kehadiran partai politik tidak akan terhindarkan. Partai politik telah mengubah relasi antara rakyat dengan penguasa. Untuk melihat seberapa jauh peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat, sekali lagi harus dilihat dalam konteks perspektif sejarah perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Pada awal kemerdekaan, partai politik belum berperan secara optimal sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Hal ini terlihat dari timbulnya berbagai gejolak dan ketidakpuasan di sekelompok masyarakat yang merasa aspirasinya tidak terwadahi dalam bentuk gerakan-gerakan separatis seperti proklamasi Negara Islam oleh

⁶Pasaribu, P. *Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2017, 5 (1): hlm.54

Kartosuwiryo tahun 1949, terbentuknya negara negara boneka yang bernuansa kedaerahan.⁷

Pendidikan politik tentunya tidak akan terlaksana tanpa adanya penyelenggaraan yang dilakukan secara konkret di lapangan atau di tengah tengah masyarakat. Menurut Kuntowijoyo (1994:58) mengemukakan tentang bentuk pendidikan politik, yakni :⁸

1. Pendidikan politik formal yakni pendidikan politik yang diselenggarakan melalui indoktrinasi.
2. Pendidikan politik yang dilakukan secara nonformal, seperti melalui pertukaran pendidikan melalui mimbar bebas.

Dalam pendidikan politik akan diperoleh kemampuan rakyat untuk menganalisa macam-macam konflik politik, dan berusaha untuk ikut memecahkannya. Dengan demikian orang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk ikut mengatur negara dan pemerintahan, dan mengontrol gerak pembangunan, tanpa terjadi konflik-konflik yang membahayakan.⁹

Pendidikan politik yang baik adalah pendidikan politik yang memobilisasi simbol-simbol nasional, seperti sejarah, seni sastra, dan bahasa. Kenyataan bahwa negara terbentuk dari hubungan-hubungan politik membawa dampak terjadinya proses politik sepanjang

⁷Ananta ,aris, *Politik islam in Indonesia* (Jakarta:PT Raja grafindo persada, 2000).hlm.48

⁸Idrus Affandi,Karim Suryadi,*Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik*. PKNI4423/MODUL 1. hlm. 6

⁹Kartono, Kartini.. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. 1989 Jakarta: Mandar Maju. hlm.25

kelangsungan hidup negara. Karena itu, proses politik yang terjadi baik bentuk maupun intensitas tidak mungkin dihindari setiap warga dalam negara. Setiap warga negara pasti akan berhubungan atau bersinggungan dengan proses politik, entah itu disukai atau tidak disukai. Ini menunjukkan betapa proses politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan setiap warga dalam negara. Oleh Karena itu, sudah seyogianya setiap warga dalam negara untuk mengambil bagian atau berpartisipasi dalam setiap proses politik yang terjadi. Sebaliknya Jika warga negara tidak mengambil bagian dalam proses politik yang terjadi maka kepentingan politiknya sebagai warga negara akan terabaikan.¹⁰

Seyogianya proses pemilu ataupun pilkada seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme jujur dan adil, dengan berbagai tahapan yang harus dilaksanakan dalam prosesnya, sebagai salah satu instrument demokrasi pendidikan politik tentu menjadi suatu keharusan dilakukan, agar masyarakat dapat memahami proses demokrasi di negeri ini. Jika proses demokrasi dilakukan dengan sebagaimana mestinya, maka persatuan dan kesatuan bangsa akan tercapai serta perpecahan antar golongan juga akan dapat dihindari, dengan proses yang sesuai maka hal itu akan dapat diwujudkan dan juga memberikan iklim yang baik bagi proses demokrasi di Indonesia.

Sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 103 dan An- Nur Ayat 54 yang berbunyi :

¹⁰Wanma, Alex Victor, *Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik Di Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor*, (Jurnal Politico, 2015). hlm.5

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ
النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk”(QS.Al-Imran : 103).¹¹

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۚ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

“Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”(QS.An-Nur : 54).”¹²

¹¹<https://tafsirweb.com/1235-quran-surat-ali-imran-ayat-103.html> di akses pada tanggal 12-06-20 pkl 16.02 WITA

¹²<https://tafsirweb.com/6182-quran-surat-an-nur-ayat-54.html> di akses pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 16.40 WITA

Dalam penjelasan Al-Qurán Surah Al-Imran ayat 103 dan An-Nur ayat 54 diatas sangat ditekankan tentang persatuan dan ketaatan dari seruan/anjuran, anjuran agar selalu mentaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya agar manusia selamat hidupnya di dunia dan akhirat. Persatuan dan persaudaraan itu diperlukan dan memang dianjurkan. Setiap lingkungan bangsa dan setiap Negara memerlukan persatuan untuk menyelamatkan kepentingan bersama. Tetapi persatuan tidak akan terwujud tanpa adanya rasa persaudaraan pada hati setiap anggota lingkungan, bangsa atau Negara itu.¹³

Persatuan dan persaudaraan sangat ditekankan agar tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, sehingga hal-hal yang tidak sesuai dapat dirubah agar tidak membuat permasalahan yang lebih besar dikemudian hari. Di dalam sebuah hadits (Syarh Al-Arba'in An Nawawiyyah ke-34: 2004) Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]

“Dari Abu Sa’id Al Khudri radiallahuanhu berkata : Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka

¹³Husni Thoyyar, Nazwar Ismail, Ilmu-Ilmu Tafsir. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1983/1984.hlm.15

(tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. (H.R. Muslim, No.49)”.¹⁴

Namun realita yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal pelaksanaan pendidikan politik tersebut masih sangat kurang, faktanya dalam pemilu dan pilkada terdapat banyak permasalahan seperti politik uang, kampanye negatif dan lain sebagainya yang masih terjadi, hal ini secara tidak langsung mengartikan bahwa partai-partai politik di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum melaksanakan pendidikan politik dengan baik dan malah memberikan pendidikan politik yang tidak sesuai dengan harapan demokrasi yang baik.

Berdasarkan permasalahan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan terarah dengan membuat karya ilmiah yang berjudul **”Peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat di identifikasikan beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat di Kab. Hulu Sungai Utara?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat di Kab. Hulu Sungai Utara?

¹⁴Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. 1425 H (2004). *Syarh Al-Arba’in An Nawawiyah*. Dar Ats-Tsuraya. No. 49 hadist ke. 34

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di Kab. Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat di Kab. Hulu Sungai Utara

D. Segnifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian disebut juga dengan manfaat penelitian, dimana sebuah hasil penelitian hendaknya bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat (segi praktis) serta dapat memberika sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (segi teoritis).¹⁵ Manfaat dari segi praktis, yaitu kegunaan yang bersifat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁶ Sementara itu adapun kegunaan yang diharapkan penulis yaitu :

1. Tulisan ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara terkait peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan partai politik.
2. Sebagai bahan telaah, informasi serta sumbangan pemikiran khususnya dibidang Hukum Tata Negara, bagi siapa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut seputar masalah yang berkaitan.

¹⁵Elisabeth Nurhani Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama,2018), hlm.123

¹⁶Ibid hlm.123

3. Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah *khazanah* dalam perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
4. Kalangan praktisi maupun teoritis hukum serta bagi masyarakat pada Selain itu, diharapkan juga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi umumnya dalam memahami hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pengertian dalam memberikan interpretasi judul diatas, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

a. Peran

Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Menurut Anton Moelyono (1949), peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain.¹⁷ Peran yang dimaksud disini yaitu partai politik menjalankan fungsinya dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat sebagaimana yang diperintahkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik.

- b. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

¹⁷Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*,(Jakarta, Rajawali, 1986), hlm. 212

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan partai politik disini adalah institusi partai politik yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara

- c. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah salah satu partai politik di Indonesia yang juga dikenal sebagai salah satu partai Islam. PPP mempunyai platform yang dibagi dalam beberapa bidang, yakni agama, politik, ekonomi, hukum, sosial, pengetahuan dan keterampilan, dan pendidikan. Dalam bidang agama, PPP mengedepankan peran agama sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan negara dengan hubungan yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara. PPP disini sebagai salah satu partai politik yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dikabupaten Hulu Sungai Utara¹⁸
- d. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik yang dimaksud yaitu pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat dalam bentuk pertemuan oleh partai politik terhadap masyarakat dalam memberikan pemahaman dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹⁸<https://m.merdeka.com/partai-persatuan-pembangunan/profil/> di akses pada 1 Juli 2021 Pukul 23.32 WITA

e. Masyarakat adalah manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.¹⁹ Yang dimaksud dengan masyarakat disini ialah masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang dalam hal ini sebagai orang yang harus menerima pendidikan politik tersebut.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada, berdasarkan itu dengan ini saya cantumkan penelitian terdahulu terkait permasalahan ini adalah sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh Aris Tri Wibowo mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Peran Partai Politik Golkar Dalam Pendidikan Politik (Studi Kasus Di DPD Partai Golkar Kabupaten Sragen)”, substansi dari penelitian ini adalah bagaimana peran partai politik golongan karya (GOLKAR) dalam pendidikan politik pada DPD Kabupaten Sragen.²⁰ Penelitiannya bertujuan untuk mendiskripsikan peran partai politik

¹⁹Tejokusumo, Bambang, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Geoedukasi Volume III Nomor 1, Maret 2014. hlm.39

²⁰Wibowo, Aris, Tri. *Peran Partai Politik Golkar Dalam Pendidikan Politik (Studi Kasus di DPD Partai GOLKAR Kabupaten Sragen).*”Skripsi (2014)

golongan karya (GOLKAR) dalam pendidikan politik studi kasus DPD kabupaten Sragen.

Skripsi yang ditulis oleh Afen Sandika mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Peran PDI Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017”, substansi dari penelitian ini adalah meneliti peran partai PDI dalam pilkada Mesuji tahun 2017.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Sariningtiyas mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik (Studi Peran Partai Pdi Dan Hanura Kota Malang), tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana program-program partai politik dalam memberikan pendidikan politik serta dapat menjadi bahan acuan partai politik sebagai perbaikan partai politik kedepan, dalam tulisan ini menekankan bahwa Untuk menumbuhkan partisipasi yang otonom dari setiap warga negara, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar mutlak diperlukan.²²

Jurnal yang ditulis oleh Payerli Pasaribu mahasiswa Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan yang berjudul Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik *The Role of Political Parties In Conducting Political Education*,

²¹Sandika, Afen.”*Peran PDI Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017.*”Skripsi (2018)

²²Sariningtiyas, *Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik (Studi Peran Partai Pdi Dan Hanura Kota Malang)*, Skripsi Tahun 2013

substansi dari jurnal ini yaitu memberikan gambaran bagaimana pentingnya peran partai politik dalam menjalankan fungsinya dalam pendidikan politik, dalam tulisan ini menekankan pentingnya partai politik dalam meningkatkan kemampuan anggotanya agar tercapainya tujuan bersama. Pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik antara lain ialah berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sadar akan hak dan kewajiban suatu tanggung jawabnya sebagai warga Negara terhadap kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian pendidikan politik akan menjadi sarana, terpeliharanya stabilitas nasional guna memperlancar usaha pencapaian cita-cita bangsa melalui pembangunan.²³

Jurnal yang ditulis oleh Yulianto Dwi Saputro mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Program Studi Ketahanan Nasional yang berjudul Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Di DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009 - 2014). Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang menggambarkan fenomena sosial yang kompleks terjadi di masyarakat, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada kader maupun kepada masyarakat masih rendah. Metode serta materi pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik masih sangat konseptual dan kurang aplikatif. Metode evaluasi dalam pemberian pendidikan politik tidak berjalan dengan efektif,

²³Pasaribu, P., *Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2017, 5 (1): hlm. 51-59

sehingga peran partai politik dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara menjadi rendah. Selain itu, berakibat rendahnya tingkat kualitas kader partai politik dalam mendorong perbaikan kehidupan masyarakat. Implikasi peran partai politik dalam pendidikan politik generasi muda terhadap ketahanan politik wilayah berdampak pada rendahnya partisipasi politik masyarakat dan rendahnya tingkat peran serta masyarakat dalam pembuatan serta pengawasan kebijakan publik.²⁴

Kesimpulan penulis terhadap skripsi diatas bahwa objek yang diteliti sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai Politik yang membahas peran partai politik dalam pendidikan politik dengan meneliti Partai Golkar dan PDI. Namun, jelas berbeda dengan penelitian penulis yang bermaksud membahas peran Partai Peratuan Pembangunan (PPP) dalam tugasnya melaksanakan pendidikan politik dalam hal ini di daerah kabupaten Hulu Sungai Utara.

G. Sistematika penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan untuk memberikan gambaran yang jelas maka disusunlah suatu sistematika yang berisi informasi yang akan dibahas dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah penelitian yang berisikan gambaran dari permasalahan yang akan peneliti angkat,

²⁴Yulianto Dwi Saputro, *Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Di DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009-2014)*. Jurnal Ketahanan Nasional Nomor XXI (1) April 2015 hlm. 34-42

kemudian rumusan masalah merupakan pertanyaan dari latar belakang yang sudah digambarkan sebelumnya, selanjutnya tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai oleh penulis, setelah itu disusunlah definisi operasional untuk memberikan pemahaman yang terarah sehingga tidak menimbulkan makna luas, kemudian kajian pustaka sebagai pengetahuan adanya penelitian terdahulu yang juga mengangkat permasalahan yang sama ataupun berbeda juga sebagai referensi penulis dalam hal ini, dan sistematika penulisan yang memudahkan penyusunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II berisikan landasan teoritis yang berisikan permasalahan yang diangkat oleh penulis, serta teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini.

Bab III membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, sesuai dengan data yang didapat peneliti kemudian menyusunnya untuk mudah dianalisis dan menyusunnya secara sistematis.

BAB IV berisikan hasil dari penelitian yang didapat oleh penulis dengan teknik pengumpulan data yang dijelaskan pada bab III,

BAB V Penutup pada bab ini berisikan kesimpulan secara keseluruhan mengenai permasalahan yang penulis angkat baik itu kekurangan atau kelebihan dan saran yang penulis berikan untuk kedepannya supaya tidak terjadi kembali masalah serupa.